

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Fiscal Stress* dan *Political fragmentation* terhadap *Expenditure change* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD dan data jumlah anggota DPRD yang diperoleh dari *Open Data* Jabar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,982 dan masuk dalam kategori “Rentan”. *Political fragmentation* memiliki nilai rata-rata sebesar 47 dan tergolong dalam kategori “Besar”. Sedangkan *Expenditure change* rata-ratanya sebesar 0,007 yang termasuk dalam kategori “Rendah”. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh negatif terhadap *Expenditure change* dengan nilai signifikansi sebesar -0,049 ($-0,049 < 0,05$) dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 16,4%, sedangkan *Political fragmentation* berpengaruh positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 ($0,014 < 0,05$) dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 55,2%. Hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh secara simultan terhadap *Expenditure change* dengan nilai F sebesar 0,006 ($0,006 < 0,05$) Nilai koefisien determinasi (R^2) simultan sebesar 0,689 yang berarti bahwa 68,9% variasi *Expenditure change* dapat dijelaskan oleh *Fiscal Stress* dan *Political fragmentation*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tekanan fiskal dapat membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengubah belanjanya, sedangkan tingginya fragmentasi politik mendorong dinamika pengambilan keputusan anggaran yang lebih besar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kondisi keuangan dan dinamika politik daerah.

Kata kunci: *Fiscal Stress*, *Political fragmentation*, *Expenditure change*, pemerintah daerah, keuangan daerah.